

**PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA
(KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA
PEMERINTAHAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS



Oleh
NASIB SOLICHIN
NPM. 041801039

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**PELAYANAN PENGURUSAN KARTU KELUARGA
(KK) DAN KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) PADA
PEMERINTAHAN KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister Administrasi Publik (MAP)
Pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area



Oleh

NASIB SOLICHIN
NPM. 041801039

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2007**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Pelayanan Pengurusan Kartu Keluarga (KK) Dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pada Pemerintahan Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang.

N a m a : Nasib Solichin

N I M : 041801039

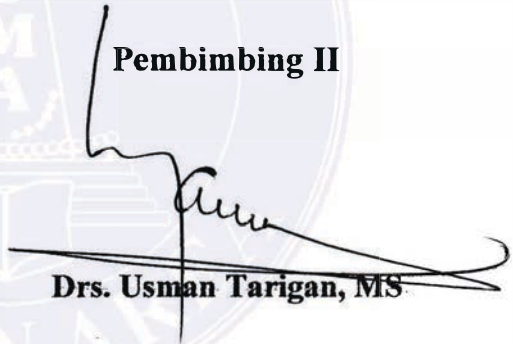
Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA

Pembimbing II



Drs. Usman Tarigan, MS

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Drs. Kariono, MA

Direktur




Drs. Heri Kusmanto, MA

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
C. Pembatasan Masalah.....	8
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Pemikiran	9
BAB II. URAIAN TEORITIS	12
A. Pengertian Administrasi.....	12
B. Pengertian Tata Laksana Administrasi	15
C. Pengertian dan Arti Penting Pelayanan	20
D. Upaya Meningkatkan Pelayanan	22
E. Pengertian Pemerintahan	26
F. Pengertian Tentang Kebijakan.....	27
G. Aspek-Aspek Kebijakan	30
BAB III. METODE PENELITIAN	33
A. Lokasi Penelitian	33

B. Populasi dan Sampel	33
C. Metode Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisa Data	35
BAB IV. DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
1. Sejarah Singkat Kecamatan Percut Sei Tuan	39
2. Letak dan Geografis	39
3. Kependudukan dan Perekonomian	41
4. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Percut Sei Tuan.	44
B. Pembahasan	50
1. Analisis Aspek Kesederhanaan	51
2. Analisis Aspek Ketepatan Waktu Pelayanan	58
3. Analisis aspek Kejelasan dan Kepastian	62
4. Analisis Aspek Kelengkapan Sarana Pendukung	67
5. Pertanggung Jawaban Pelaku Aktivitas Pemerintahan	
Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kepada Masyarakat	73
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	81
A. Kesimpulan	81
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Desa/Kelurahan bagi bangsa Indonesia memiliki nilai historis yang khas, sebab sebelum terbentuknya pemerintahan modern seperti sekarang ini desa/kelurahan sesungguhnya telah menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan kenegaraan berdasarkan nilai-nilai tradisional dan kearifan budaya yang hidup dan dipatuhi oleh rakyatnya. Namun sejalan dengan kehadiran negara modern, kemandirian dan kemampuan masyarakat desa/kelurahan mulai berkurang. Kondisi ini sangat kuat terlihat dalam Pemerintahan Orde Baru, ketika Undang-Undang No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa digunakan untuk melakukan sentralisasi, birokratisasi mengikat ini maka konsep desa/kelurahan sebagai sebuah kesatuan masyarakat hukum hanya tinggal sebatas ajang bagi penguasa untuk memperkuat posisinya dengan menerapkan pola-pola yang berdalihkan pembangunan mengeksploitasi desa/kelurahan. Desa/Kelurahan tidak hanya lebih digerakkan sebagai lumbung pangan nasional dan memasok berbagai kebutuhan kota. Sejalan dengan itu maka hilanglah fungsi kepemimpinan adat dan tradisional berganti dengan pola kepemimpinan formal yang tidak jarang proses kepemimpinan di desa/kelurahan dilakukan dengan cara-cara yang tidak demokratis dan mematikan potensi masyarakat untuk berpartisipasi secara sukarela.

Sejalan dengan proses reformasi politik dan pergantian pemerintahan yang terjadi pada tahun 1998, kemudian dengan diikuti lahirnya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang antara lain mencabut Undang-Undang No. 5 Tahun 1979, dan selanjutnya dicabut dan diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2005 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kehidupan desa/kelurahan mengalami reposisi dan ditata ulang dengan lebih mengedepankan penghargaan terhadap faktor-faktor heterogenitas, asal-usul, nilai-nilai tradisional dan kearifan lokal bahkan sampai kepada bentuk pengakuan terhadap pemerintahan asli. Di samping itu sistem pemerintahan desa/kelurahan yang diatur langsung di dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 telah memberikan ruang gerak yang lebih luas kepada masyarakat dan pemerintahan desa/kelurahan untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain kehidupan yang lebih otonomi diberikan kepada Pemerintahan desa/kelurahan.

Meskipun demikian tidak berarti kita beranggapan bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah yang diatur di dalamnya hal-hal pokok mengenai pemerintahan desa/kelurahan telah sempurna dan tidak mengandung banyak kelemahan.

Adanya perubahan-perubahan dan atau pembaharuan yang terjadi di tingkat desa/kelurahan ini dipandang perlu untuk disikapi oleh berbagai pihak baik Pemerintah, Akademisi, dan masyarakat secara keseluruhan termasuk di

DAFTAR PUSTAKA

- Dwight Waldo, *Pengantar Studi Administrasi*, Diterjemahkan oleh Slamet W. Admosoedarmo, Aksara Baru, Jakarta, 1995.
- George R. Terry, *Office Management and Control*, Homewood, Illionis, Richard D. Irwin, 3rd.ed, 1996.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1997.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006.
- M. Solly Lubis *Azas-azas Hukum Tata Negara*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.
- Moekijat, *Prinsip-Prinsip Administrasi Management dan Kepemimpinan*, Alumni, Bandung, 2004.
- Muhammad Ali, *Pengantar Metodologi Research Sosial*, Alumni, Bandung, 1995.
- Paul Mahieu, *De Administratieve Organisatie der Onderneming*, 1967.
- Riant Nugroho, *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2003.
- S. Prajudi Atmosoedirjo, *Dasar-Dasar Ilmu Administrasi* , Ghalia Indonesia, Jakarta, 2000.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995.
- Soekarno K. *Dasar-Dasar Manajemen*, Firma Tekad, Jakarta, 1995.
- Soewarno Handyaningrat, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta, 1995.
- Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, Gunung Agung, Jakarta, 2000.
- Sudjana, Metode *Statistika*, Tarsito, Bandung, 1986.

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Kelurahan*, Jakarta, 2001.

Sutrisno Hadi, *Statistik 2*, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 1996.

The Liang Gie, *Administrasi Perkantoran Modern*, Penerbit Nur Cahaya, Yogyakarta, 2003.

_____, *Ilmu Administrasi*, Percetakan Republik Indonesia, Yogyakarta, 2002.

_____, *Pengertian, Kedudukan dan Perincian Ilmu Administrasi*, Super Sukses, Yogyakarta, 2001.

William H. Leffingwell and Edwin M. Robinson, *Textbook of Management*, New York, McGraw-Hill Book Company, 3rd.ed., 1998.

William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2000.

Winarno Surakhmad, *Pengantar ilmiah, Dasar, Metode, Teknik*, Tarsito, Bandung, 1997.